

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa Baitul Maal berarti rumah usaha. Baitul Maal pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba¹.

BMT Palur merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (financial intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT Palur menggunakan akad bagi hasil yaitu *murābahah* dan *murābahah* untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murābahah*.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murābahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* disebutkan bahwa bank

¹Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: UII Perss, 2004), hlm. 126.

(BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murābahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²

BMT Palur merupakan salahsatu lembaga keuangan mikro yang cukup besar di wilayah Kabupaten Karanganyar, dimana BMT tersebut berada di lokasi yang strategis yaitu di area terminal dan pasar Palur serta banyak melakukan praktik akad *murābahah*, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya *murābahah* perlu dikaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya *murābahah*, dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah saat ini. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT PALUR KARANGANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana yang telah diuraikandi atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang **Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Murābahah* di BMT Palur Karanganyar dan Kesesuaiannyadengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?**

²Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.73.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di BMT PALUR KARANGANYAR dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagaipihak, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangpemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya BMT PALUR KARANGANYAR.